



**GERMAS**

Gerakan Masyarakat  
Hidup Sehat

# RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026



**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PONOROGO**

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 – 2026**



## **DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO**

**Kantor Terpadu Gedung Graha Bakti Praja  
Jl. Basuki Rahmad Lantai 1 dan 2**

## KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan adalah program berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) dan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo. Mengacu pada visi, nawa darma nyata dan misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Ponorogo serta RPJMN Kementerian Kesehatan RI, maka pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh semua elemen yang terdiri dari masyarakat, swasta dan pemerintah secara sinergis dan berhasil guna mencapai KESEHATAN HEBAT masyarakat Ponorogo.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan setiap lembaga / satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyusun rencana strategis secara rinci sebagai acuan pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 telah selesai disusun. Selanjutnya diharapkan semua komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan semua pihak yang berkepentingan dalam bidang kesehatan dapat memanfaatkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan ini sebagai acuan dan pedoman dalam merencanakan kegiatan. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, 5 Oktober 2021

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PONOROGO  
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN



Dr. Drs. AGUS PRAMONO, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700111 198903 1 002

**DAFTAR ISI**

|  |           |
|--|-----------|
| Halaman Sampul .....   | i         |
| Kata Pengantar .....   | ii        |
| Daftar Isi.....  | iii       |
| Daftar Tabel .....   | iv        |
| SK Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.....                                   | v         |
| <b>LAMPIRAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2016-2021</b>   |           |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum .....   | 2         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....  | 4         |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....  | 4         |
| <b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                                    | <b>6</b>  |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....                               | 6         |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....   | 9         |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....   | 10        |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan<br>Perangkat Daerah .....                     | 15        |
| <b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT<br/>            DAERAH .....</b>    | <b>17</b> |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Pelayanan Perangkat Daerah ..... | 17        |
| 3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....   | 18        |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....   | 20        |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian<br>Lingkungan Hidup Strategis .....         | 21        |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....  | 21        |
| <b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN .....</b>  | <b>24</b> |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....                                  | 24        |
| <b>BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>   | <b>27</b> |
| <b>BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN<br/>            SERTA PENDANAAN .....</b>            | <b>31</b> |
| <b>BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>                                   | <b>52</b> |
| <b>BAB VIII  PENUTUP .....</b>   | <b>55</b> |

**DAFTAR TABEL**

| Nomor         | Judul Tabel   | Halaman |
|---------------|---|---------|
| Tabel T-C.23. | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah<br>Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo .....               | 12      |
| Tabel T-C.24. | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah<br>Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo ..... | 13      |
| Tabel T-C.25. | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan<br>Perangkat Daerah .....                                  | 26      |
| Tabel T-C.26. | Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan .....  | 29      |
| Tabel T-C.27. | Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah<br>Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo .....   | 33      |
| Tabel T-C.28. | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu<br>Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....                  | 54      |



DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 188.4/6749/405.09/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan dengan menuangkannya dalam suatu keputusan Kepala Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

## Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
- (2) Rencana Strategis selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo selama 5 (lima) tahun;
- (3) Rencana Kerja Tahunan selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo periode 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

Renstra Dinas Kesehatan merupakan :

- (1) Penjabaran lebih lanjut atas visi, nawa darma nyata, misi dan program Bupati Ponorogo yang telah dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan bagi aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

## Pasal 3

- (1) Renstra Dinas Kesehatan dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
- (2) Renstra Dinas Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional, Propinsi, dan Kabupaten.

## Pasal 4

- (1) Isi dan uraian Renstra Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## Pasal 5

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada tanggal : 5 Oktober 2021

---

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PONOROGO  
SELAH PENGUNA ANGGARAN



Dr. Drs. AGUS PRAMONO, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700111 198903 1 002

## **LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 188.4/6749/405.09/2021**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2021 - 2026**

**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2021**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dengan maksud digunakan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan kesehatan dengan harapan agar perencanaan pembangunan kesehatan di daerah bisa bersinergi dengan perencanaan pembangunan kesehatan nasional dan provinsi melalui rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan kesehatan. Dengan mengacu pada dokumen rencana strategis ini maka seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan kesehatan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan satu pola tindak untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan renstra, pelaksanaan forum perangkat / lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan akhirnya ditetapkan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat penjabaran misi bupati di bidang kesehatan selama 5 (lima) tahun. Dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen perencanaan baik vertikal maupun horizontal, secara vertikal berpedoman pada program prioritas RPJMN bidang kesehatan Tahun 2020-2024 dan bersinergi dengan program prioritas RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Secara horizontal berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ponorogo dan dokumen KHLS-RTRW, dimana dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran diuraikan dalam dokumen rencana kerja (RENJA) tahunan Dinas Kesehatan.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2025.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan ini dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) utamanya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan.

Sedangkan secara umum tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan adalah :

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan yang merupakan acuan tahunan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.
- b. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan kesehatan dalam mendukung pembangunan daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, yang memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, yang memuat :

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, yang memuat :
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN, yang memuat :
  - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- Bab VIII : PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Bab II pasal 2, adalah sebagai berikut :

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Kesehatan.

##### **2.1.2 Fungsi**

Fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 adalah :

- a. Perumusan kebijakan urusan kesehatan.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas kesehatan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

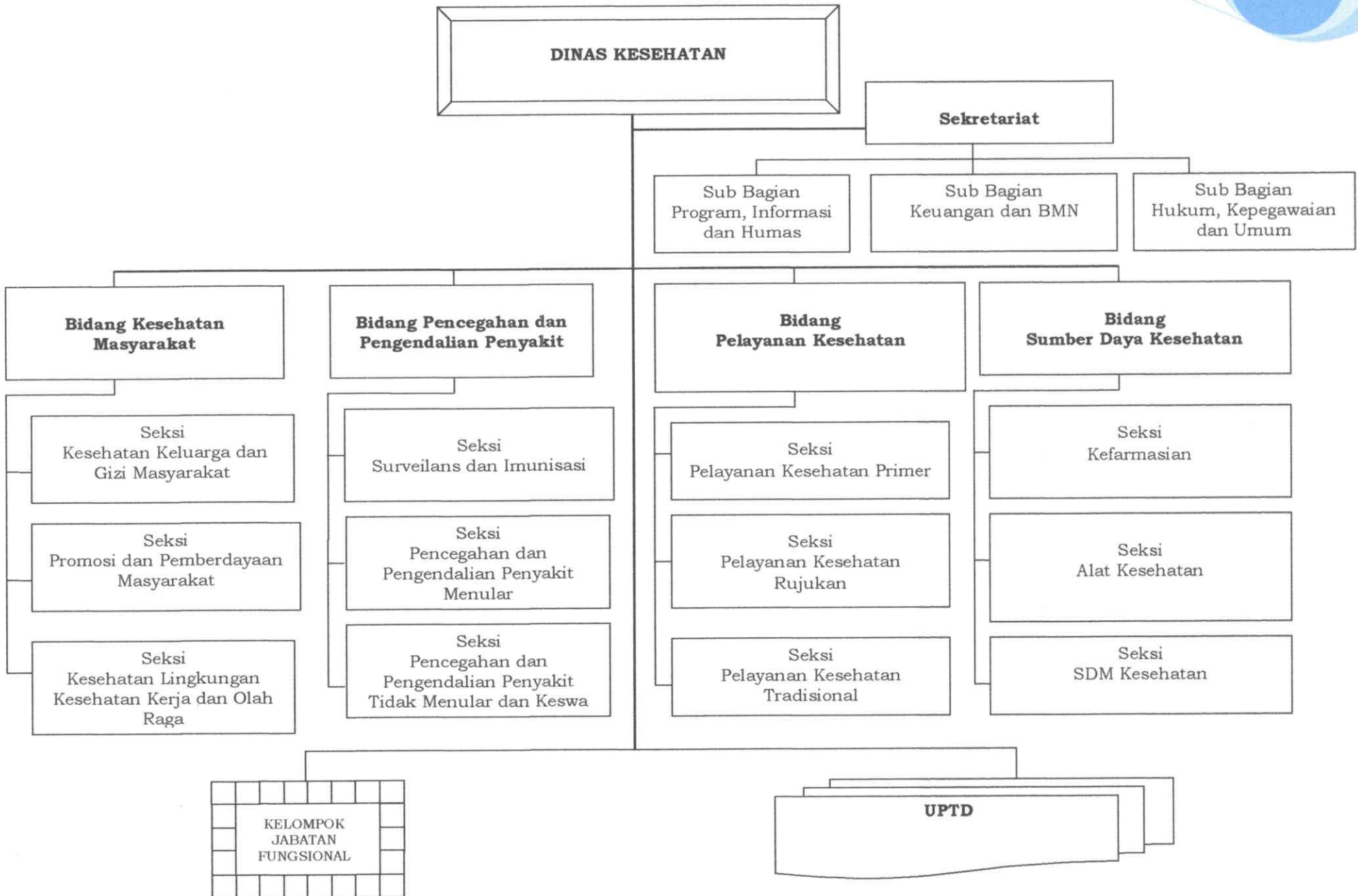
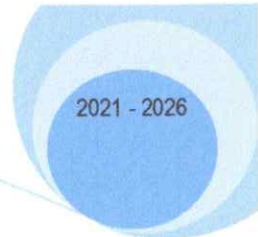
##### **2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh seorang sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, lebih lengkap uraian struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIAT
  - a. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas

- b. Sub Bagian Keuangan dan BMN
- c. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
- 3. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
  - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
  - c. Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 4. BIDANG PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
  - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
  - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa
- 5. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 6. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
  - a. Seksi Kefarmasian
  - b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan
  - c. Seksi SDM Kesehatan
- 7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
- 8. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD ), terdiri dari
  - a. Puskesmas sebanyak 31 ( tiga puluh satu )
  - b. Laboratorium Kesehatan Daerah
  - c. Depo Farmasi dan Alat-alat Kesehatan

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo :



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan

Salah satu pendukung utama dalam pembangunan kesehatan adalah ketersediaan Tenaga Kesehatan yang memadai, dalam hal jumlah dan kualitas. Untuk itu tenaga kesehatan seharusnya tersedia sesuai dengan kebutuhan. Jumlah pegawai di Dinas Kesehatan serta UPT pada tahun 2020 sebanyak 1.473 orang terdiri dari :

a. Pejabat Struktural

- Struktural Eselon II : 1
- Struktural Eselon III : 5
- Struktural Eselon IV : 15

b. Pejabat Fungsional sebanyak 1.173 meliputi :

- Dokter umum : 59
- Dokter gigi : 26
- Perawat : 475
- Bidan : 419
- Kesehatan Masyarakat : 36
- Sanitarian : 24
- Petugas Gizi : 26
- Analis Laboratorium : 27
- Teknik Biomedik : 4
- Keterampilan Fisik : 4
- Kefarmasian : 21

c. Tenaga dukungan manajemen sebanyak 279

### 2.2.2 Sarana Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo didukung dengan adanya sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Dinas Kesehatan mempunyai UPT yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat yaitu puskesmas, laboratorium kesehatan daerah, Depo Farmasi dan Alat-alat Kesehatan. Sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Ponorogo terdapat 31 (tiga puluh satu) puskesmas tersebar di 21 kecamatan, terdiri dari 12 (dua belas)

puskesmas rawat jalan dan 19 (sembilan belas) puskesmas dengan Rawat Inap, yang semua puskesmas merupakan Puskesmas Mampu PONED. Untuk memperluas jangkauan pelayanan dibangun 57 puskesmas pembantu yang mengkoordinasikan pelayanan kesehatan di 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa sekitar, disamping itu di tingkat desa ada sarana Ponkesdes sebagai tempat pelayanan, sampai tahun 2020 terdapat 184 Ponkesdes. Sarana pendukung pelayanan lainnya berupa puskesmas keliling sebanyak 40 unit, dan 31 unit ambulance. Dan sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan telah dibangun Public Safety Center (PSC) yang beroperasi selama 24 jam dengan jejaring di 21 kecamatan, 6 rumah sakit dan 31 puskesmas bekerja sama dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan juga tergantung dari peran serta atau keterlibatan masyarakat secara aktif dalam upaya kesehatan, termasuk juga lintas sektor, salah satu wadah yang menampung peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam upaya kesehatan adalah posyandu balita, posbindu, posyandu lansia, UKK, poskestren dan UKBM lainnya. Sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo terdapat 1.129 posyandu balita; 268 posyandu lansia dan 309 posbindu (pos pembinaan terpadu).

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selama Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- h. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- i. Pembinaan Lingkungan Sosial

- j. Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan
- k. Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan
- l. Pelayanan Kesehatan pada UPT

Hasil dari pelaksanaan program-program tersebut ditunjukkan pada pencapaian sasaran pemerintah daerah untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel TC. 23 dan TC. 24.

**Tabel T-C.23.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN PONOROGO**

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                      | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- |        |       |        |        | Realisasi Capaian Tahun ke- |       |       |        |       | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|---|--------|-------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|--------|-------|------------------------------|------|------|------|------|
|     |   |             |            |                          | 1   | 2      | 3     | 4      | 5      | 1                           | 2     | 3     | 4      | 5     | 1                            | 2    | 3    | 4    | 5    |
| (1) | (2)   | (3)         | (4)        | (5)                      | (6)                                       | (7)    | (8)   | (9)    | (10)   | (11)                        | (12)  | (13)  | (14)   | (15)  | (16)                         | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1   | Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup                            | -           | 96.89      | -                        | 97.19                                     | 97.09  | 96.99 | 96.89  | 96.79  | 112                         | 163   | 83    | 102.98 | 95.01 | 0.9                          | 0.6  | 1.0  | 0.9  | 1.0  |
| 2   | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup                              | -           | 23         | -                        | 25.61                                     | 24.74  | 23.87 | 23     | 22.13  | 17                          | 13.7  | 12.4  | 12.17  | 11.97 | 1.0                          | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  |
| 3   | Prevalensi balita stunting  | <20%        | -          | -                        | 25.40%                                    | 25.20% | 25%   | 24.80% | 24.80% | 26.9%                       | 25.1% | 21.7% | 17.8%  | 16.9% | 0.9                          | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  |
| 4   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | -           | 80         | -                        | 78  | 79     | 80    | 82     | 84     | 80.11                       | 80.11 | 80.2  | 79.04  | 88    | 1.0                          | 1.0  | 1.0  | 0.96 | 1.0  |
| 5   | % puskesmas terakreditasi   | 100%        | -          | -                        | 33%                                       | 67%    | 100%  | 100%   | 100%   | 0%                          | 32%   | 100%  | 100%   | 100%  | 0.0                          | 0.5  | 1.0  | 1.0  | 1.0  |
| 6   | % Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | -           | 60%        | -                        | 0%  | 0%     | 13%   | 16%    | 16%    | -                           | -     | 13%   | 22%    | 3.2%  | -                            | -    | 1.0  | 1.4  | 0.2  |
| 7   | CFR Covid-19  | -           | -          | -                        | -   | -      | -     | -      | -      | -                           | -     | -     | -      | -     | -                            | -    | -    | -    | -    |
| 8   | CFR HIV/AIDS  | -           | 40%        | -                        | 20%                                       | 19%    | 18%   | 17%    | 17%    | 14%                         | 7%    | 11%   | 21%    | 32%   | 1.0                          | 1.0  | 1.0  | 0.8  | 0.5  |
| 9   | CFR TB paru per 100.000 pddk  | -           | 0.92       | -                        | 2   | 2      | 2     | 2      | 2      | 3                           | 4.5   | 4.7   | 4.9    | 5.46  | 1.5                          | 2.3  | 2.4  | 2.5  | 2.7  |
| 10  | Persentase Desa Bebas DBD   | -           | 0          | -                        | 4%  | 6%     | 8%    | 10%    | 12%    | 9%                          | 4%    | 6%    | 1%     | 50%   | 2.3                          | 0.7  | 0.8  | 0.1  | 4.2  |
| 11  | Proporsi penderita kusta anak   | < 5%        | -          | -                        | < 5%                                      | < 5%   | < 5%  | < 5%   | < 5%   | 3.9%                        | 0%    | 5.13% | 3%     | 0%    | 1.0                          | 1.0  | 0.01 | 1.0  | 1.0  |
| 12  | Persentase Desa UCI   | 85%         | -          | -                        | 85%                                       | 85%    | 85%   | 85%    | 85%    | 49%                         | 81%   | 72%   | 80%    | 89%   | 0.6                          | 0.9  | 0.8  | 0.9  | 1.0  |
| 13  | Prevalensi Hipertensi   | 30%         | -          | -                        | 30%                                       | 30%    | 30%   | 30%    | 30%    | 0%                          | 4%    | 21%   | 16%    | 15%   | 0.0                          | 0.1  | 0.7  | 0.5  | 0.5  |
| 14  | Prevalensi Diabetes melitus   | 30%         | -          | -                        | 30%                                       | 30%    | 30%   | 30%    | 30%    | 0%                          | 1%    | 16%   | 64%    | 86%   | 0.0                          | 0.0  | 0.5  | 2.1  | 2.9  |

**Tabel T-C.24.**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN PONOROGO**

| Uraian  | Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan) |           |            |            |            | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan) |           |           |            |            | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke- |      |      |      |      | Rata-rata pertumbuhan |           |
|---|--|-----------|------------|------------|------------|--|-----------|-----------|------------|------------|--|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|   | 1                                      | 2         | 3          | 4          | 5          | 1  | 2         | 3         | 4          | 5          | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | Anggaran              | Realisasi |
| (1)   | (2)                                    | (3)       | (4)        | (5)        | (6)        | (7)  | (8)       | (9)       | (10)       | (11)       | (12)   | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)                  | (18)      |
| Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup                            | 1,258,478                              | 1,238,061 | 2,781,683  | 2,015,553  | 2,217,109  | 763,678  | 1,700,398 | 159,418   | 2,508,640  | 4,510,384  | 0.6  | 1.4  | 0.1  | 1.2  | 2.0  | 1,902,177             | 1,928,504 |
| Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup                              | 1,258,478                              | 1,238,061 | 2,781,683  | 2,015,553  | 2,217,109  | 763,678  | 1,700,398 | 159,418   | 2,508,640  | 4,510,384  | 0.6  | 1.4  | 0.1  | 1.2  | 2.0  | 1,902,177             | 1,928,504 |
| Prevalensi balita stunting  | 1,258,478                              | 1,238,061 | 2,781,683  | 2,015,553  | 2,217,109  | 763,678  | 1,700,398 | 159,418   | 2,508,640  | 4,510,384  | 0.6  | 1.4  | 0.1  | 1.2  | 2.0  | 1,902,177             | 1,928,504 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat  | 11,949,905                             | 9,220,978 | 12,853,062 | 11,157,383 | 12,273,121 | 8,967,508  | 9,631,534 | 5,454,877 | 10,841,323 | 12,598,160 | 0.8  | 1.0  | 0.4  | 1.0  | 1.0  | 11,490,890            | 9,498,680 |
| % puskesmas terakreditasi   | 11,949,905                             | 9,220,978 | 12,853,062 | 11,157,383 | 12,273,121 | 8,967,508  | 9,631,534 | 5,454,877 | 10,841,323 | 12,598,160 | 0.8  | 1.0  | 0.4  | 1.0  | 1.0  | 11,490,890            | 9,498,680 |
| % Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | 11,949,905                             | 9,220,978 | 12,853,062 | 11,157,383 | 12,273,121 | 8,967,508  | 9,631,534 | 5,454,877 | 10,841,323 | 12,598,160 | 0.8  | 1.0  | 0.4  | 1.0  | 1.0  | 11,490,890            | 9,498,680 |
| CFR Covid-19  | 119,880                                | 131,868   | 605,135    | 159,560    | 175,516    | 128,578  | 104,759   | 96,991    | 538,016    | 157,170    | 1.1  | 0.8  | 0.2  | 3.4  | 0.9  | 238,391               | 205,103   |
| CFR HIV/AIDS  | 119,880                                | 131,868   | 605,135    | 159,560    | 175,516    | 128,578  | 104,759   | 96,991    | 538,016    | 157,170    | 1.1  | 0.8  | 0.2  | 3.4  | 0.9  | 238,391               | 205,103   |
| CFR TB paru per 100.000 pddk  | 119,880                                | 131,868   | 605,135    | 159,560    | 175,516    | 128,578  | 104,759   | 96,991    | 538,016    | 157,170    | 1.1  | 0.8  | 0.2  | 3.4  | 0.9  | 238,391               | 205,103   |
| Persentase Desa Bebas DBD   | 119,880                                | 131,868   | 605,135    | 159,560    | 175,516    | 128,578  | 104,759   | 96,991    | 538,016    | 157,170    | 1.1  | 0.8  | 0.2  | 3.4  | 0.9  | 238,391               | 205,103   |
| Proporsi penderita kusta anak   | 119,880                                | 131,868   | 605,135    | 159,560    | 175,516    | 128,578  | 104,759   | 96,991    | 538,016    | 157,170    | 1.1  | 0.8  | 0.2  | 3.4  | 0.9  | 238,391               | 205,103   |

| Uraian                      | Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan) |         |         |         |         | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan) |         |        |         |         | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke- |      |      |      |      | Rata-rata pertumbuhan |           |
|-----------------------------|--|---------|---------|---------|---------|--|---------|--------|---------|---------|--|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|                             | 1                                      | 2       | 3       | 4       | 5       | 1  | 2       | 3      | 4       | 5       | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | Anggaran              | Realisasi |
| (1)                         | (2)                                    | (3)     | (4)     | (5)     | (6)     | (7)  | (8)     | (9)    | (10)    | (11)    | (12)   | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)                  | (18)      |
| Persentase Desa UCI         | 119,880                                | 131,868 | 605,135 | 159,360 | 175,516 | 128,578  | 104,759 | 96,991 | 538,016 | 157,170 | 1.1  | 0.8  | 0.2  | 3.4  | 0.9  | 238,391               | 205,103   |
| Prevalensi Hipertensi       | 119,880                                | 131,868 | 605,135 | 159,360 | 175,516 | 128,578  | 104,759 | 96,991 | 538,016 | 157,170 | 1.1  | 0.8  | 0.2  | 3.4  | 0.9  | 238,391               | 205,103   |
| Prevalensi Diabetes melitus | 119,880                                | 131,868 | 605,135 | 159,360 | 175,516 | 128,578  | 104,759 | 96,991 | 538,016 | 157,170 | 1.1  | 0.8  | 0.2  | 3.4  | 0.9  | 238,391               | 205,103   |

## 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya Dinas Kesehatan juga mengalami tantangan serta peluang dalam pengembangan pelayanan kesehatan.

### 2.4.1. Kekuatan

Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan dan upaya pengembangan pelayanan kesehatan utamanya di puskesmas dan jaringannya adalah

#### a. Sumber daya

- 1) Semua puskesmas di Kabupaten Ponorogo telah menjadi PPK-BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah), di mana puskesmas menjadi fleksible dalam mengelola pendapatannya sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanannya melalui pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar.
- 2) Tersedianya tenaga yang tersebar di seluruh puskesmas dan jaringannya (medis dan para medis).
- 3) Sarana pelayanan telah menjangkau sampai ke tingkat desa berupa polindes, maupun ponkesdes, bahkan 307 desa di Kabupaten Ponorogo telah menjadi Desa Siaga.
- 4) Dari 31 puskesmas yang ada, 19 diantaranya telah dikembangkan menjadi rawat inap dan ditingkatkan pelayanannya menjadi puskesmas PONED.
- 5) Dibangunnya rumah sakit tipe D pada Tahun 2022, semakin meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

#### b. Pelayanan

- 1) Terdapatnya perda retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Adanya Standart Pelayanan Minimal
- 3) Adanya Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelayanan
- 4) Adanya Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)

### 2.4.2. Kelemahan

#### a. Sumberdaya

- 1) Kurangnya tenaga-tenaga fungsional tertentu di puskesmas diantaranya tenaga Dokter Gigi, Laboratorium, Asisten Apoteker, gizi dan lain-lain.

- 2) Masih ada tenaga fungsional yang perlu ditingkatkan kapasitas dan ketrampilannya dalam memberikan pelayanan yang sesuai standar.
- 3) Kurangnya kedisiplinan karyawan.
- 4) Kurangnya motivasi kerja petugas di semua jajaran kesehatan.
- 5) Masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- 6) Pandemi *Corono virus 2019* (COVID-19) sejak Tahun 2020 menyebabkan peningkatan angka kematian penduduk serta menyebabkan inflasi di sektor ekonomi serta perubahan pola hidup social.

b. Pelayanan

- 1) Beban kerja pegawai yang rangkap tugas dan jabatan sehingga tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- 2) Belum semua jenis layanan mempunyai SOP.
- 3) Kepatuhan petugas terhadap SOP yang sudah ada masih perlu ditingkatkan.
- 4) Lemahnya koordinasi lintas sektor maupun lintas program.
- 5) Semakin tingginya kasus penyakit tidak menular (PTM) yang menyebabkan kematian seperti jantung koroner, stroke, kanker dan lain-lain
- 6) Banyaknya tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID-19.

**2.4.3. Peluang**

- 1) Peningkatan pelayanan kegawatdaruratan dengan semakin banyaknya kejadian bencana, kecelakaan dan kasus kejadian luar biasa lainnya.
- 2) Tersedianya UKBM dalam bentuk posyandu balita, posyandu remaja, posyandu lansia, poskestren, posbindu.
- 3) Program vaksinasi COVID-19 untuk seluruh penduduk.

**2.4.4. Tantangan**

- 1) Adanya program BPJS kesehatan dan Jamkesda
- 2) Jangkauan pelayanan kesehatan bisa ditingkatkan melalui Poskesdes, Polindes maupun Ponkesdes serta UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 4) Dana Insentif Daerah (DID)

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

###### 3.1.1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal

Setiap organisasi secara internal memiliki faktor kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*) yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya.

| S (Strenghts/Kekuatan) |   | W (Weakness/Kelemahan) |   |
|------------------------|---|------------------------|---|
| 1                      | Tersedianya SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi, motivasi dan komitmen kinerja | 1                      | Distribusi, pemenuhan dan kinerja SDM Kesehatan belum sesuai standar                                |
| 2                      | Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional  | 2                      | Regulasi rekrutmen pegawai tidak sejalan dengan realitas kebutuhan tenaga, indiscipliner dan mutasi |
| 3                      | Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar               | 3                      | Jenis, kuantitas dan kualitas sarana prasarana belum sesuai dengan standart                         |
| 4                      | Adanya regulasi, NSPK dan pedoman yang mendukung program Kesehatan                | 4                      | Pemahaman petugas terhadap regulasi, NSPK dan pedoman program yang ada belum optimal                |
| 5                      | Sudah adanya Standar Prosedur Operasional di Fasilitas Kesehatan                  | 5                      | Pemahaman dan kepatuhan petugas terhadap SPO belum optimal  |
| 6                      | FKTP dan FKTL Terakreditasi   | 6                      | Lemahnya perencanaan, advokasi dan pengawasan terhadap program kesehatan                            |

###### 3.1.2 Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal

| O ( <i>Opportunity</i> /Peluang) |  | T ( <i>Threat</i> /Ancaman) |  |
|----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1                                | Adanya UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) sebagai wadah peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan | 1                           | Masih ditemui Pola Perilaku Hidup di masyarakat yang belum mendukung paradigma sehat |
| 2                                | Adanya lembaga swadaya masyarakat peduli kesehatan dan peran lintas sektor                                   | 2                           | Stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap penderita penyakit masih tinggi          |

|   |                                 |   |  |
|---|---------------------------------|---|--|
| 3 | Adanya program BPJS-JKN         | 3 | Rendahnya kesadaran masyarakat untuk secara mandiri sebagai peserta BPJS-JKN |
| 4 | Program prioritas Kepala Daerah | 4 | Adanya pandemi COVID-19  |
|   |                                 | 5 | Persaingan dengan pihak swasta   |

Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan adanya mempunyai beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dan ancaman. Keterkaitan antar faktor-faktor tersebut menyangkut beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya tujuan pembangunan kesehatan yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Visi : "**Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)**"

Nawa Darma Nyata :

1. Meningkatkan Produktivitas Petani melalui Reformasi Sistem Pertanian;
2. Mencetak Generasi Penerus yang Unggul, Kreatif, Kritis, Mandiri, Berkepribadian, Beriman, Berakhlak Mulia dan Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional;
4. Memberdayakan Perempuan dalam perannya ikut meningkatkan Kesejahteraan Keluarga;
5. Mereformasi sektor pariwisata dan merevitalisasi Budaya Asli Ponorogo yang berpusat pada Kesenian Reyog;
6. Meningkatkan Pembinaan Sektor Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pembangunan Manusia;
7. Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki Era Ekonomi Digital;

8. Memberdayakan dan Menguatkan Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan koperasi;
9. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih, Efektif, Transparan, Bermartabat, Melindungi, Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Misi :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Dinas Kesehatan memiliki kontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

**Nawa Darma Nyata : 3. Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional; Misi 2, “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya” bertujuan** untuk “Meningkatkan kualitas kesehatan dan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan yang berkualitas”, sehingga bidang kesehatan dapat menjadi lokomotif penggerak pembangunan kesehatan, dengan **sasaran** yang akan dicapai adalah “Meningkatnya status / derajat kesehatan masyarakat.”

Faktor yang menjadi pendorong agar pemerintah daerah mampu mencapai tujuan pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen kepala daerah beserta aparatnya dalam mendukung upaya kesehatan

- b. Ketersediaan sumber daya yang mencukupi
- c. Peran serta masyarakat

Selain faktor pendorong, perlu juga diperhatikan faktor penghambat tercapainya tujuan kesehatan karena hal ini justru menjadi pekerjaan rumah bersama agar tidak menjadi masalah dalam pencapaian misi kepala daerah. Faktor yang kemungkinan menjadi penghambat pencapaian tujuan adalah :

- a. Pola Perilaku Hidup di masyarakat yang belum mendukung paradigma sehat
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk secara mandiri sebagai peserta BPJS-JKN.
- c. Stigma dan diskriminasi.
- d. Pandemi *Corona virus 2019 (COVID-19)*

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo tidak lepas dari kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga kebijakan kementerian kesehatan sangat berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di tingkat kabupaten.

Sasaran Indikator Kementerian Kesehatan periode 2020-2024 juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat.
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Faktor yang menjadi pendorong agar Dinas Kesehatan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi syarat
- b. Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi, cukup dan merata sesuai kebutuhan
- c. Promosi kesehatan
- d. Jaminan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin

Sedangkan faktor yang kemungkinan menjadi penghambat pencapaian tujuan dan sasaran kesehatan adalah :

- a. Sumber daya manusia kesehatan yang kurang dan tidak merata.
- b. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan kesehatan.
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 31 puskesmas, 6 rumah sakit, klinik/balai pengobatan, praktik dokter dan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti polindes, ponkesdes, poskesdes dan posyandu serta 307 desa/kelurahan di Kabupaten Ponorogo masuk kategori Desa Siaga.

Sarana pelayanan kesehatan tersebut sudah tersebar di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Ponorogo bahkan untuk UKBM sudah menjangkau di semua desa. Akses masyarakat secara geografis sudah baik, namun pengetahuan masyarakat tentang ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di wilayahnya masih kurang. Jaminan kesehatan belum menjangkau masyarakat secara menyeluruh dan beberapa belum tepat sasaran.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan

investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang (mindset) dari paradigma sakit ke paradigma sehat. Namun demikian perilaku masyarakat secara umum masih belum mendukung terwujudnya pola hidup bersih dan sehat, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung peningkatan status kesehatan penduduk.

Salah satu faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah kondisi kesehatan lingkungan yang tercermin antara lain dari akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar.

Perkembangan sarana transportasi mempengaruhi mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, hal ini memungkinkan meningkatnya risiko penyebaran penyakit antar wilayah. Perubahan iklim yang terjadi karena pemanasan global juga berpengaruh pada siklus hidup vektor penyakit. Ditambah dengan adanya pandemi global *Corona virus 2019 (COVID-19)* semakin menambah berat pekerjaan rumah sektor kesehatan dikarenakan Covid-19 merupakan virus jenis strain baru.

### **3.5.1 Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut :

- a. Pola Perilaku Hidup di masyarakat yang belum mendukung paradigma sehat.
- b. Dukungan lintas sektor dan swasta masih kurang.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat secara mandiri sebagai peserta BPJS-JKN.
- d. Kurangnya kompetensi, tidak meratanya distribusi serta pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar.
- e. Jenis, kuantitas dan kualitas sarana prasarana belum sesuai dengan standart.
- f. Masih tingginya kejadian penyakit menular dan wabah serta kejadian bencana alam termasuk kejadian kegawatdaruratan.
- g. Pandemi Corona virus 2019 (COVID-19)
- h. Semakin tingginya kasus penyakit tidak menular (PTM)

### 3.5.2 Isu Strategis

Dari analisis perkembangan dan masalah pembangunan kesehatan, serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis pada urusan Kesehatan di Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Pandemi *Corona virus 2019 (COVID-19)* menjadi masalah kesehatan masyarakat, ekonomi dan social.
2. Vaksinasi *Corona virus 2019 (COVID-19)* belum memenuhi target.
3. Pengalihan dukungan kepesertaan PBID Provinsi ke PBID kabupaten.
4. Pemenuhan dan distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang belum sesuai standar.
5. Ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas masih belum memenuhi standar.
6. Re-Akreditasi puskesmas dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terhambat akibat pandemi COVID-19.
7. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan ditambah adanya kecenderungan peningkatan kesakitan dan kematian karena penyakit degenerative.
8. Semakin tingginya kasus kegawatdaruratan yang memerlukan penanganan khusus baik situasi KLB, bencana maupun kecelakaan.
9. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor.
10. Pola Perilaku Hidup Masyarakat dalam pembangunan kesehatan masih banyak yang belum memenuhi paradigma sehat.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan **Nawa Darma Nyata 3** : “*Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional*; **Misi 2**, “*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya*” menetapkan **Tujuan** yaitu “*Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.*”

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir Tahun 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
  - a. Angka Kematian Ibu (AKI)
  - b. Angka Kematian Bayi (AKB)
  - c. Prevalensi balita stunting
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  - b. Persentase puskesmas terakreditasi
  - c. Persentase Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
3. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

- a. CFR Covid-19
- b. CFR HIV/AIDS
- c. CFR TB paru per 100.000 penduduk
- d. Persentase Desa Bebas DBD
- e. Proporsi penderita kusta anak
- f. Persentase Desa UCI
- g. Prevalensi Hipertensi
- h. Prevalensi Diabetes melitus

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL T-C.25.**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

| No. | TUJUAN  | SASARAN   | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN  | SATUAN                      | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- |        |        |        |       |        |
|-----|---|---|---|-----------------------------|--|--------|--------|--------|-------|--------|
|     |   |   |   |                             | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025  | 2026   |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)   | (5)                         | (6)  | (7)    | (8)    | (9)    | (10)  | (11)   |
|     | Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan |   | Usia Harapan Hidup (UHH)  | Tahun                       | 72.908                                       | 73.046 | 73.184 | 73.322 | 73.46 | 73.598 |
| 1   |   | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat  | Angka Kematian Ibu (AKI)  | per 100.000 Kelahiran Hidup | 95.01  | 95     | 94.08  | 94.06  | 94.04 | 94.04  |
|     |   |   | Angka Kematian Bayi (AKB)   | per 1.000 Kelahiran Hidup   | 11.97  | 11.95  | 11.93  | 11.91  | 11.89 | 11.89  |
|     |   |   | Prevalensi balita stunting  | Persen                      | <20  | <20    | <20    | <20    | <20   | <20    |
| 2   |   | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | -                           | 88   | 89     | 89     | 90     | 90    | 90     |
|     |   |   | % puskesmas terakreditasi   | Persen                      | 100  | 100    | 100    | 100    | 100   | 100    |
|     |   |   | % Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | Persen                      | 3.2  | 3.7    | 4.2    | 4.7    | 5.2   | 5.2    |
| 3   |   | Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa | CFR Covid-19  | Persen                      | <10  | <8     | <6     | <4     | <2    | <1     |
|     |   |   | CFR HIV/AIDS  | Persen                      | 31.9   | 30     | 28     | 26     | 24    | 24     |
|     |   |   | CFR TB paru   | per 100.000 Penduduk        | 5.46   | 5.26   | 5.16   | 5.06   | 4.96  | 4.96   |
|     |   |   | Persentase Desa Bebas DBD   | Persen                      | 50   | 50     | 52     | 54     | 56    | 56     |
|     |   |   | Proporsi penderita kusta anak   | Persen                      | 0  | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
|     |   |   | Persentase Desa UCI   | Persen                      | 88.9   | 89     | 90     | 90     | 91    | 91     |
|     |   |   | Prevalensi Hipertensi   | Persen                      | 40.22  | 40.17  | 40.12  | 40.07  | 40.02 | 40.02  |
|     |   |   | Prevalensi Diabetes melitus   | Persen                      | 2.18   | 2.13   | 2.08   | 2.03   | 1.98  | 1.98   |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai suatu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan tergantung pada jenis sasaran yang ingin dicapai, antara lain :

1. Strategi untuk pencapaian sasaran *Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat* adalah meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan balita, meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan lintas program dan lintas sektor serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penanganan permasalahan gizi masyarakat, meningkatkan akses lingkungan sehat serta meningkatkan promosi kesehatan pada masyarakat
2. Strategi untuk pencapaian sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan* adalah meningkatkan akses dan mutu sarana pelayanan kesehatan serta meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
3. Strategi untuk pencapaian sasaran *Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa*, adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian penyakit dan kejadian luar biasa (KLB) serta meningkatkan dukungan dan peran serta lintas sektor.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut :

- a. Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak.
- b. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, balita, ibu hamil dan menyusui.
- c. Peningkatan Akses lingkungan sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan dukungan serta peran serta lintas sektor.
- d. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

- e. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisme dengan lintas program maupun lintas sektor dalam membudayakan PHBS.
- f. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin.
- g. Pemenuhan ketersediaan dan pengendalian obat dan perbekalan kesehatan.
- h. Peningkatan pembiayaan kesehatan dan pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan.
- i. Pendayagunaan tenaga kesehatan yang kompeten secara optimal sesuai kebutuhan.
- j. Peningkatan upaya pencegahan, surveilans, deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular, penyakit potensial KLB/wabah yang diikuti dengan pengobatan sesuai standar serta penanggulangan masalah kesehatan lainnya serta bencana.

Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL T-C.26.**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

| <b>VISI</b>                                     | : Mewujudkan Kabupaten Ponorogo <b>HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)</b>                            |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>MISI 2</b>                                   | : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan |   |  |
| <b>NAWA DHARMA NYATA 3</b>                      | : Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional                       |   |  |
| Tujuan  | Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan   |
| Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan | 1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat  | a. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan balita, meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan lintas program dan lintas sektor serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penanganan permasalahan gizi masyarakat, meningkatkan akses lingkungan sehat serta meningkatkan promosi kesehatan pada masyarakat | 1) Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak<br>2) Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, balita, ibu hamil dan menyusui.<br>3) Peningkatan Akses lingkungan sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan dukungan serta peran serta lintas sektor<br>4) Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)<br>5) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisme dengan lintas program maupun lintas sektor dalam membudayakan PHBS |
|   | 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan   | b. Meningkatkan akses dan mutu sarana pelayanan kesehatan serta meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)   | 1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin<br>2) Pemenuhan ketersediaan dan pengendalian obat dan perbekalan kesehatan  |

| Tujuan | Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan  |
|--------|--|---|---|
|        |  |   | 3) Peningkatan pembiayaan kesehatan dan pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan  |
|        |  |   | 4) Pendayagunaan tenaga kesehatan yang kompeten secara optimal sesuai kebutuhan   |
|        | 3. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa | c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian penyakit dan kejadian luar biasa (KLB) serta meningkatkan dukungan dan peran serta lintas sektor | 1) Peningkatan upaya pencegahan, surveilans, deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular, penyakit potensial KLB/wabah yang dikuti dengan pengobatan sesuai standar serta penanggulangan masalah kesehatan lainnya serta bencana |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka untuk 5 (lima) tahun ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo menetapkan program dan kegiatan berikut :

#### **Sasaran Kesatu - Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat**

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, maka dirumuskan program sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan :
  - a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, meliputi kegiatan :
  - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

#### **Sasaran Kedua - Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan**

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, maka dirumuskan program sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan :
  - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
  - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.
  - c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, meliputi kegiatan :
  - a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.
  - b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, meliputi kegiatan :
  - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
  - b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
  - c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

**Sasaran Ketiga - Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa.**

Untuk mencapai sasaran meningkatnya penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa, maka dirumuskan program sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan :
  - a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping itu untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo juga direncanakan beberapa program dan kegiatan rutin sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, meliputi :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - g. Peningkatan Pelayanan BLUD.

Uraian rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif Dinas Kesehatan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL T-C.27.**  
**RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN PONOROGO**

| Tujuan  | Sasaran  | Kode    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc                                      | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |                                      |  |               |            |               |            |               |            |               |            |               |   |               | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi          |    |    |    |    |  |
|---|--|---------|--|--|--|---|--------------------------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|-----------------------------|-----------------|----|----|----|----|--|
|   |  |         |  |  |  | Tahun 2021  |                                      | Tahun 2022   |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode restra |               |                             |                 |    |    |    |    |  |
|   |  |         |  |  |  | Target  | Rp                                   | Target   | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | 2025                                      | Rp            |                             |                 |    |    |    |    |  |
| (1)   | (2)  | (3)     | (4)  | (5)  | (6)  | (7)   | (8)                                  | (9)  | (10)          | (11)       | (12)          | (13)       | (14)          | (15)       | (16)          | (17)       | (18)          | (19)                                      | (20)          | (21)                        | (22)            |    |    |    |    |  |
| Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan | A. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan           | 1.02.01 | 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA      | a. Persentase tingkat kepuasan pegawai mendapatkan pelayanan umum kantor   | 80%  | 80%   | 75,761,273.24                        | 81%  | 79,748,708.67 | 82%        | 83,736,144.11 | 83%        | 87,912,951.31 | 84%        | 92,319,098.88 | 85%        | 96,935,053.82 | 85%                                       | 96,935,053.82 | Dinas Kesehatan             | Dinas Kesehatan |    |    |    |    |  |
|   | b. Persentase sarana prasarana kantor memenuhi standar |         |  | 80%  | 80%  |   |                                      |  |               |            |               |            |               |            |               |            |               |   |               | 0%                          |                 |    |    |    |    |  |
|   | c. Nilai LKE SKPD                                      |         |  | A  | A  |   |                                      | A  |               | A          |               |            |               |            |               |            | A             |   | A             |                             |                 |    |    |    |    |  |
|   | B. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat          | 2.01    | 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | a.1 Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu  | 85%  | 85%   |                                      |  |               |            |               |            |               |            |               |            |               |   |               | 0%                          |                 |    |    |    |    |  |
|   | 01   |         |  | 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | a) Jumlah dokumen perencanaan  | 6 dok   | 6 dok                                |  |               |            |               |            |               |            |               |            |               |   |               |                             |                 | 0% |    |    |    |  |
|   |  |         |  |  | a) Jumlah dokumen laporan kinerja pemerintah                             | 3 dok   | 3 dok                                |  |               |            |               |            |               |            |               |            |               |   |               |                             |                 |    | 0% |    |    |  |
|   | 07   |         |  | 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | b) Jumlah dokumen laporan kinerja program kesehatan                      | 5 dok   | 5 dok                                |  |               |            |               |            |               |            |               |            |               |   |               |                             |                 |    | 0% |    |    |  |
|   |  |         |  |  | a.2 Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan SK | 100%  | 100%                                 |  |               |            |               |            |               |            |               |            |               |   |               |                             |                 |    | 0% |    |    |  |
|   | 2.02   |         |  | 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 |  | b.2 Persentase SPP-SPM yang diterbitkan dalam satu tahun            | 100%                                 | 100%   |               |            |               |            |               |            |               |            |               |   |               |                             |                 |    | 0% |    |    |  |
|   |  |         |  |  |  | c.2 Persentase dokumen laporan keuangan diselesaikan tepat waktu    | 90%                                  | 90%  |               |            |               |            |               |            |               |            |               |   |               |                             |                 |    |    | 0% |    |  |
|   |  |         |  |  |  | 01  | 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | a) Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan | 1035 org      | 1035 org   |               |            |               |            |               |            |               |   |               |                             |                 |    |    |    | 0% |  |
|   | 02   |         |  | 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | a) Jumlah dokumen SPP/SPM yang diterbitkan sesuai pengajuan              | 5000 dok  | 5000 dok                             |  |               |            |               |            |               |            |               |            |               |   |               |                             |                 |    | 0% |    |    |  |
|   | 08   |         |  | 3) Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran            | a) Jumlah dokumen laporan keuangan yang dikerjakan                       | 5 dok   | 5 dok                                |  |               |            |               |            |               |            |               |            |               |   |               |                             |                 |    | 0% |    |    |  |
|   | 2.06   |         |  | 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | a.3 Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP                       | 90%   | 90%                                  |  |               |            |               |            |               |            |               |            |               |   |               |                             |                 |    | 0% |    |    |  |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                 | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | Urit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|---|--|-------------------------------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|----|-----------------------------|--------|
|        |         |      |   |  |                                     | Tahun 2021  |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Tahun 2025 |    | Tahun 2026 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra |    |                             |        |
|        |         |      |   |  |                                     | Target  | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | 2026                                       | Rp |                             |        |
|        |         | 01   | 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | a) Persentase komponen listrik disediakan sesuai rencana                                   | 100%                                | 100%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 04   | 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | a) Persentase makanan minuman disediakan sesuai kebutuhan                                  | 100%                                | 100%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         |      |   | b) Persentase kegiatan Pengadaan ATK yang dikelola sesuai rencana                          | 90%                                 | 90%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 05   | 3) Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan                                       | a) Persentase kegiatan cetak/pengandaan yang dikelola sesuai rencana                       | 100%                                | 100%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 06   | 4) Penyediaan Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-Undangan                      | a) Persentase media cetak dan peraturan hukum disediakan sesuai kebutuhan                  | 100%                                | 100%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 09   | 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | a) Persentase pegawai yang dibayai perjalanan dinas sesuai kebutuhan                       | 42%                                 | 42%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 207  | 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | a.4 a. Persentase kebutuhan kendaraan operasional tercukupi                                | 0%                                  | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         |      |   | b.4 b. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi                          | 70%                                 | 70%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 02   | 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | a. Persentase pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai rencana           | 0%                                  | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 11   | 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | a. Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai rencana                   | 90%                                 | 90%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 208  | 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | a.5 Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP   | 88%                                 | 88%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         |      |   | b.5 Persentase administrasi kepegawaian tepat waktu  | 90%                                 | 90%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 01   | 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | a) Persentase kegiatan administrasi kantor (surat menyurat) yang dikelola sesuai rencana   | 92%                                 | 92%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 02   | 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | a) Persentase komponen pendukung perkantoran (telpn, air, listrik) dikelola sesuai rencana | 100%                                | 100%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                    | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |  |    | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|---|---|-------------------------------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|----|-----------------------------|--------|
|        |         |      |   |   |                                     | Tahun 2021  |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Tahun 2025 |    | Tahun 2026 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra |    |                             |        |
|        |         |      |   |   |                                     | Target  | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | 2026                                       | Rp |                             |        |
|        |         | 04   | 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | a) Persentase jasa administrasi dikelela sesuai rencana                                       | 100%                                | 100%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         |      |   | b) Persentase jasa kebersihan kantor dilaksanakan sesuai rencana                              | 100%                                | 100%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 2.09 | 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | a.6 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi                                | 73%                                 | 73%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 02   | 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | a) Persentase jasa pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai rencana                   | 84%                                 | 84%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         |      |   | b) Persentase kendaraan dinas yang durus pajaknya sesuai rencana                              | 100%                                | 100%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 05   | 2) Pemeliharaan Mebelair  | a) Persentase jasa pemeliharaan mebelair dilaksanakan sesuai rencana                          | 0%                                  | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 06   | 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | a) Persentase jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai rencana | 96%                                 | 96%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 2.10 | 1.7 Peringkatan Pelayanan BLUD  | a.7 Indeks Kepuasan Masyarakat wilayah puskesmas  | 80%                                 | 80%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         |      |   | b.7 Strata Akreditasi   | Dasar / Madya / Utama               | Dasar / Madya / Utama   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         |      |   | c.7 Persentase Nilai PKP  | 76%                                 | 76%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 01   | 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ponorogo Utara  | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana                          | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 01   | 2) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ponorogo Selatan  | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana                          | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |
|        |         | 01   | 3) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Siman   | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana                          | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |    |                             |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |   |    |
|--------|---------|------|---|--|-------------------------------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|-----------------------------|--------|---|----|
|        |         |      |   |  |                                     | Tahun 2021  |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Tahun 2025 |    | Tahun 2026 |    |                             |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode restru |    |
|        |         |      |   |  |                                     | Target  | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp |                             |        | 2026                                      | Rp |
|        |         | 01   | 4) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ronowijayan | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana       | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 01   | 5) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jenangan    | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana       | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 01   | 6) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Setono      | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana       | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 01   | 7) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Babadan     | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana       | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 01   | 8) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sukosari    | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana       | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 01   | 9) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sukorejo    | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana       | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 01   | 10) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kaurman    | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana       | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 01   | 11) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngranda    | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana       | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 01   | 12) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Badegan    | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana       | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 01   | 13) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jambon     | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana       | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 01   | 14) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sampung    | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana       | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 01   | 15) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kunti      | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana       | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dari Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |   |    |
|--------|---------|------|--|---|-------------------------------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|-----------------------------|--------|---|----|
|        |         |      |  |   |                                     | Tahun 2021  |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Tahun 2025 |    | Tahun 2026 |    |                             |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode restra |    |
|        |         |      |  |   |                                     | Target  | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp |                             |        | 2026                                      | Rp |
|        |         | 01   | 16) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Balorg      | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana        | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |   |    |
|        |         | 01   | 17) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Slahung     | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana        | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |   |    |
|        |         | 01   | 18) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Nailan      | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana        | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |   |    |
|        |         | 01   | 19) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bungkal     | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana        | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |   |    |
|        |         | 01   | 20) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngayun      | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana        | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |   |    |
|        |         | 01   | 21) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sambit      | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana        | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |   |    |
|        |         | 01   | 22) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Wringinanom | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana        | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |   |    |
|        |         | 01   | 23) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sawoo       | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana        | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |   |    |
|        |         | 01   | 24) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bondrang    | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana        | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |   |    |
|        |         | 01   | 25) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mlarak      | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana        | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |   |    |
|        |         | 01   | 26) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jetis       | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana        | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |   |    |
|        |         | 01   | 27) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pulung      | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana        | 91%                                 | 91%   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |   |    |

| Tujuan | Sasaran  | Kode    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                       | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc   | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |                |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |  |                | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|--|---------|---|--|---|---|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|--|----------------|-----------------------------|--------|
|        |  |         |   |  |   | Tahun 2021  |                | Tahun 2022 |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra |                |                             |        |
|        |  |         |   |  |   | Target  | Rp             | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp             | 2026                                       | Rp             |                             |        |
|        |  | 01      | 28) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kesugihan                  | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana                             | 91%   | 91%   |                |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                | 0%   |                |                             |        |
|        |  | 01      | 29) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Soko                       | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana                             | 91%   | 91%   |                |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                | 0%   |                |                             |        |
|        |  | 01      | 30) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngebel                     | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana                             | 91%   | 91%   |                |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                | 0%   |                |                             |        |
|        |  | 01      | 31) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudak                      | a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana                             | 91%   | 91%   |                |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                | 0%   |                |                             |        |
|        |  |         |   |  |   | 0%  |                |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                | 0%   |                |                             |        |
|        | A. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan   | 1.02.02 | 2. PROGRAM PEMENUHAN UPAY A KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | a. Angka Kematian Ibu (AKI)  | 90%   | 90%   | 106,826,632.72 | 91%        | 93,237,346.59 | 92%        | 94,310,342.24 | 93%        | 96,656,976.71 | 94         | 99,264,386.46 | 95%        | 102,046,502.81 | 95%  | 102,046,502.81 |                             |        |
|        | B. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat  |         |   | b. Angka Kematian Bayi (AKB)   |   |   | 0%             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |  | 0%             |                             |        |
|        | C. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa |         |   | c. Prevalensi balita stunting  |   |   | 0%             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |  | 0%             |                             |        |
|        |  |         |   | d. Indeks Kepuasan Masyarakat  |   |   | 0%             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |  | 0%             |                             |        |
|        |  |         |   | e. % puskesmas terakreditasi   |   |   | 0%             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |  | 0%             |                             |        |
|        |  |         |   | f. % Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)               |   |   | 0%             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |  | 0%             |                             |        |
|        |  |         |   | g. CFR Covid-19  |   |   | 0%             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |  | 0%             |                             |        |
|        |  |         |   | h. CFR HIV/AIDS  |   |   | 0%             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |  | 0%             |                             |        |
|        |  |         |   | i. CFR TB paru   |   |   | 0%             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |  | 0%             |                             |        |
|        |  |         |   | j. Persentase Desa Bebas DEB   |   |   | 0%             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |  | 0%             |                             |        |
|        |  |         |   | k. Proporsi penderita luka amak  |   |   | 0%             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |  | 0%             |                             |        |
|        |  |         |   | l. Persentase Desa UCI   |   |   | 0%             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |  | 0%             |                             |        |
|        |  |         |   | m. Prevalensi Hipertensi   |   |   | 0%             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |  | 0%             |                             |        |
|        |  |         |   | o. Prevalensi Diabetes melitus   |   |   | 0%             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |  | 0%             |                             |        |
|        |  | 2.01    |   | 1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | a.1 Persentase bangunan RS Tipe D memenuhi standar                          |   | 0%             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |  | 0%             |                             |        |
|        |  |         |   |  | b.1 Persentase bangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas yang memenuhi standar |   | 0%             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |  |                | 0%                          |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | Unit Kerja Peranggung Jawab | Lokasi |  |    |
|--------|---------|------|--|---|-------------------------------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|-----------------------------|--------|--|----|
|        |         |      |  |   |                                     | Tahun 2021  |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Tahun 2025 |    | Tahun 2026 |    |                             |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra |    |
|        |         |      |  |   |                                     | Target  | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp |                             |        | 2026                                       | Rp |
|        |         |      |  | c.1 Persentase puskesmas memiliki IPAL sesuai dengan standar                              |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | d.1 Persentase puskesmas dengan ketersediaan alkes memenuhi standar                       |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | e.1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin puskesmas sesuai standar                      |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | f.1 Persentase ketersediaan BMHP puskesmas sesuai standar                                 |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         | 01   | 1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya           | a) Persentase standar kebutuhan bangunan RS tipe D dibangun sesuai rencana                |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         | 02   | 2) Pembangunan Puskesmas   | a) Persentase pembangunan puskesmas/ puskesmas/ rumah dinas sesuai dengan rencana         |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         | 09   | 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                     | a) Persentase rehab / renovasi puskesmas/ puskesmas/ rumah dinas sesuai dengan rencana    |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         | 13   | 4) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan             | a) Persentase pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan sesuai dengan rencana |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         | 14   | 5) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | a) Persentase pengadaan alkes sesuai dengan rencana                                       |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         | 15   | 6) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                   | a) Persentase alkes yang terkalibrasi sesuai dengan rencana                               |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         | 16   | 7) Pengadaan Obat, Vaksin  | a) Persentase pengadaan jumlah dan jenis obat dan vaksin sesuai rencana                   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         | 17   | 8) Pengadaan Bahan Habis Pakai   | a) Persentase pengadaan jumlah dan jenis BMHP sesuai rencana                              |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)  | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | Unit Kerja Peranggung Jawab | Lokasi |  |    |
|--------|---------|------|--|---|-------------------------------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|-----------------------------|--------|--|----|
|        |         |      |  |   |                                     | Tahun 2021  |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Tahun 2025 |    | Tahun 2026 |    |                             |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra |    |
|        |         |      |  |   |                                     | Target  | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp |                             |        | 2026                                       | Rp |
|        |         | 21   | 9) Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya | a) Persentase operasional distribusi alkes, obat, vaksin, BMHP dan makanan minuman sesuai dengan rencana            |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 2.02 | 1.2 Petyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                             | a.2 Persentase K4   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | b.2 Persentase persalinan oleh nakes  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | c.2 Persentase peserta KB aktif   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | d.2 Persentase pelayanan kesehatan pada balita  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | e.2 Persentase pelayanan kesehatan pada anak SD   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | f.2 Persentase pelayanan kesehatan pada remaja  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | g.2 Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | h.2 Persentase gizi buruk mendapat perawatan  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | i.2 Persentase penduduk yang akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | j.2 Persentase pos UKK di wilayah Kerja Puskesmas   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | k.2 Persentase Puskesmas dengan nilai pemantauan standar 8%   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | l.2 Persentase klinik yang mendapat rekomendasi ijin operasional  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | m.2 Persentase % unit layanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar - Puskesmas - Rumah Sakit |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | n.2 Persentase Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar                                      |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | o.2 Persentase Klinik Tradisional yang terstandar   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)   | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra | 2026 | Rp | Unit Kerja Peranggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|---|--|-------------------------------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|------|----|-----------------------------|--------|
|        |         |      |   |  |                                     | Tahun 2021  |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Tahun 2025 |    | Tahun 2026 |    |  |      |    |                             |        |
|        |         |      |   |  |                                     | Target  | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp |  |      |    |                             |        |
|        |         |      |   | p.2 Persentase Puskesmas dengan hasil capaian KBPKP 95 %                     |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         |      |   | q.2 Persentase penderita HIV/AIDS mendapat ARV                               |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         |      |   | r.2 Sukses rate pasien TB paru   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         |      |   | s.2 Insiden rate Penyakit DBD per 100.000 penduduk                           |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         |      |   | t.2 RFT rate kasus kusta   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         |      |   | u.2 Persentase penderita HT yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         |      |   | v.2 Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         |      |   | w.2 Persentase desa siaga sehat jiwa   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         |      |   | x.2 Persentase penduduk diberikan vaksinasi Covid-19                         |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         |      |   | y.2 Persentase KLB ditangani <24 jam   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         |      |   | z.2 Persentase Imunisasi Dasar Lengkap                                       |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         | 01   | 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | a) Persentase Kunjungan minimal 4x pd Bumil dgn frekuensi 1-1-2              |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         |      |   | b) Persentase bumil komplikasi ditangani                                     |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         | 02   | 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | a) Persentase neonatus komplikasi ditangani                                  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         |      |   | b) Persentase persalinan ditolong oleh Nakes yg kompeten                     |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         |      |   | c) Persentase penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS                           |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         | 04   | 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     | a) Persentase balita dipantau tumbuh kembangnya                              |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         | 05   | 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | a) Persentase murid SD dilakukan pejarangan kesehatan                        |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |
|        |         | 06   | 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | a) Persentase remaja yang dilakukan pemantauan kesehatannya                  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |      |    |                             |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)          | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |   |    | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|---|---|-------------------------------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|---|----|-----------------------------|--------|
|        |         |      |   |   |                                     | Tahun 2021  |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Tahun 2025 |    | Tahun 2026 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode restra |    |                             |        |
|        |         |      |   |   |                                     | Target  | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | 2026                                      | Rp |                             |        |
|        |         | 07   | 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut   | a) Persentase Usila mendapat skrening dan pemeriksaan kesehatan                     |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%  |    |                             |        |
|        |         | 11   | 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   | a) Insiden rate Penyakit TB paru  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%  |    |                             |        |
|        |         | 12   | 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV   | a) Prevalensi penyakit HIV/AIDS   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%  |    |                             |        |
|        |         | 13   | 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                 | a) Persentase penyakit potensial KLB terpantau                                      |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%  |    |                             |        |
|        |         | 14   | 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana | a) Jumlah penambahan kasus konfirmasi positif per hari                              |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%  |    |                             |        |
|        |         |      |   | b) Persentase penduduk terjangkau pemberian vaksin Covid-19 sesuai dengan pendataan |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |   | 0% |                             |        |
|        |         | 15   | 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | a) Persentase bayi EBLR   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%  |    |                             |        |
|        |         |      |   | b) Persentase balita BGM  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |   | 0% |                             |        |
|        |         |      |   | c) Persentase bumi KEK  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |   | 0% |                             |        |
|        |         | 16   | 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | a) Persentase Puskesmas menyelenggarakan K3 Puskesmas (internal)                    |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%  |    |                             |        |
|        |         |      |   | b) Persentase Pos UJKK yang dibina  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |   | 0% |                             |        |
|        |         |      |   | c) Persentase pembinaan K3 Percontoran  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |   | 0% |                             |        |
|        |         |      |   | d) Persentase pengukuran kebugaran jasmani jamaah haji                              |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |   | 0% |                             |        |
|        |         |      |   | e) Persentase pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah SD (kelas 4-6)              |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |   | 0% |                             |        |
|        |         |      |   | f) Persentase pembinaan terhadap kelompok / klub olahraga masyarakat                |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |   | 0% |                             |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                 | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |  |    |
|--------|---------|------|--|--|-------------------------------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|-----------------------------|--------|--|----|
|        |         |      |  |  |                                     | Tahun 2021  |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Tahun 2025 |    | Tahun 2026 |    |                             |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra |    |
|        |         |      |  |  |                                     | Target  | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp |                             |        | 2026                                       | Rp |
|        |         |      |  | g) Persentase pengukuran kebugaran jasmani terhadap pegawai Puskesmas                                      |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 17   | 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | a) Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar               |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | b) Persentase desa/kel ODF   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | c) Jumlah Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar           |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | d) Persentase rumah tangga akses air bersih memenuhi syarat  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | e) Persentase rumah tangga dibina  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | f) Persentase TFU memenuhi syarat  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | g) Persentase TPP memenuhi syarat  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | h) Persentase penyakit yang dirujuk ke klinik sanitasi   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 18   | 14) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | a) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik                                    |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | b) Persentase kegiatan promosi dilaksanakan sesuai rencana   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 19   | 15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | a) Persentase penegang program Puskesmas yang mendapat sosialisasi tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | b) Persentase Puskesmas/ Penyehat Tradisional yang dibina  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | c) Persentase halra yang memiliki STPT   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 20   | 16) Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | a) Jumlah penemuan kasus AFP pada penduduk usia < 15 tahun   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |  | b) Persentase pemeriksaan kesehatan CJIH   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                         | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)         | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |  |    |
|--------|---------|------|--|--|-------------------------------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|-----------------------------|--------|--|----|
|        |         |      |  |  |                                     | Tahun 2021  |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Tahun 2025 |    | Tahun 2026 |    |                             |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra |    |
|        |         |      |  |  |                                     | Target  | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp |                             |        | 2025                                       | Rp |
|        |         |      |  | c) Cakupan Imunisasi HbO   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | d) Cakupan Imunisasi BCG   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | e) Cakupan Imunisasi Polio   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | f) Cakupan Imunisasi DPT-HB  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | g) Cakupan Imunisasi MR  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | h) Cakupan imunisasi bacduta   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | i) Cakupan BIAS  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | j) Cakupan TT WUS  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         | 22   | 17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA         | a) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan                                      |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | b) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan                                      |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         | 23   | 18) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus                     | a) Persentase operasional kegiatan di PMI dilaksanakan sesuai rencana              |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         | 25   | 19) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | a) Angka Bebas Jentik (ABJ)  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | b) Prevalensi penyakit Kusta   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | c) Angka Kejadian Malaria (AKM)  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | d) Persentase Penemuan dan pengobatan kasus leptospirosis                          |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | e) Persentase Penemuan dan pengobatan kasus filariasis                             |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | f) Persentase Penemuan dan pengobatan pneumonia balita                             |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | g) Persentase Penemuan dan pengobatan kasus diare                                  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | h) Persentase desa yang melaksanakan Posbindu PTM                                  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | i) Persentase Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Terpadu (Panda) PTM              |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |
|        |         |      |  | j) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan layanan upaya berhenti merokok (UBM) |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%                          |        |  |    |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan           | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                 | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | Unit Kerja Peranggung Jawab | Lokasi |   |    |
|--------|---------|------|--|--|-------------------------------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|-----------------------------|--------|---|----|
|        |         |      |  |  |                                     | Tahun 2021  |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Tahun 2025 |    | Tahun 2026 |    |                             |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode restra |    |
|        |         |      |  |  |                                     | Target  | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp |                             |        | 2026                                      | Rp |
|        |         |      |  | k) Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada > 40% populasi |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         |      |  | l) Persentase Puskesmas yang melaksanakan program UKGS pada > 75% SD/MI di wilayahnya      |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 28   | 20) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | a) Persentase peserta PBIID yang dibayarkan premi nya                                      |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         |      |  | b) Persentase Puskesmas dengan rating Angka Kontak 4                                       |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         |      |  | c) Persentase Puskesmas dengan Rating Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik 4         |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         |      |  | d) Persentase Puskesmas dengan Rating Rasio Peserta Prohisis Rutin Berkunjang aman 4       |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 33   | 21) Puskesmas Ponorogo Utara (BOK)           | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 33   | 22) Puskesmas Ponorogo Selatan (BOK)         | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 33   | 23) Puskesmas Siman (BOK)                    | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 33   | 24) Puskesmas Ronowijayan (BOK)              | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 33   | 25) Puskesmas Jenangan (BOK)                 | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 33   | 26) Puskesmas Setono (BOK)                   | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 33   | 27) Puskesmas Babadan (BOK)                  | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 33   | 28) Puskesmas Sukosari (BOK)                 | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 33   | 29) Puskesmas Sukorejo (BOK)                 | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 33   | 30) Puskesmas Kauman (BOK)                   | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 33   | 31) Puskesmas Ngrandu (BOK)                  | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 33   | 32) Puskesmas Badegan (BOK)                  | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |
|        |         | 33   | 33) Puskesmas Jambon (BOK)                   | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |   |    |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |  |    |
|--------|---------|------|---|--|-------------------------------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|-----------------------------|--------|--|----|
|        |         |      |   |  |                                     | Tahun 2021  |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Tahun 2025 |    | Tahun 2026 |    |                             |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra |    |
|        |         |      |   |  |                                     | Target  | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp |                             |        | 2026                                       | Rp |
|        |         | 33   | 34) Puskesmas Sampung (BOK)   | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 33   | 35) Puskesmas Kunti (BOK)   | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 33   | 36) Puskesmas Balong (BOK)  | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 33   | 37) Puskesmas Slahung (BOK)   | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 33   | 38) Puskesmas Nailan (BOK)  | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 33   | 39) Puskesmas Bangsal (BOK)   | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 33   | 40) Puskesmas Ngrayun (BOK)   | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 33   | 41) Puskesmas Sambit (BOK)  | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 33   | 42) Puskesmas Wringinanom (BOK)   | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 33   | 43) Puskesmas Sewoo (BOK)   | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 33   | 44) Puskesmas Bondrang (BOK)  | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 33   | 45) Puskesmas Mlarak (BOK)  | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 33   | 46) Puskesmas Jetis (BOK)   | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 33   | 47) Puskesmas Paltung (BOK)   | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 33   | 48) Puskesmas Kesugihan (BOK)   | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 33   | 49) Puskesmas Sooko (BOK)   | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 33   | 50) Puskesmas Ngebel (BOK)  | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 33   | 51) Puskesmas Puduk (BOK)   | a) Persentase Nilai PKP  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 34   | 52) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (GUDANG FARMASI dan LABKESDA) | a) Persentase operasional GFK dilaksanakan sesuai rencana                  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         |      |   | b) Persentase operasional LABKESDA dilaksanakan sesuai rencana             |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 35   | 53) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota                   | a) Jumlah puskesmas yang didampingi re-Akreditasinya                       |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |
|        |         | 37   | 54) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                   | a) Jumlah penyakit potensial KLB yang dipantau                             |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            | 0% |                             |        |  |    |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                     | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|--|--|-------------------------------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--|-----------------------------|--------|
|        |         |      |  |  |                                     | Tahun 2021  |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Tahun 2025 |    | Tahun 2026 |    |  |                             |        |
|        |         |      |  |  |                                     | Target  | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp |  |                             |        |
|        |         |      |  | b) Jumlah penerman kasus bukan campak pada populasi  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |                             |        |
|        |         | 33   | 54) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)   | a) Persentase puskesmas yang melaksanakan peragasan dari call centre PSC                       |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |                             |        |
|        |         |      |  | b) Persentase tim ambulan desa siaga menjaga standar kelengkapan dan fungsi ambulan desa siaga |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |                             |        |
|        |         |      |  | c) Persentase puskesmas yg memiliki tim krisis kesehatan                                       |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |                             |        |
|        |         |      |  | d) Persentase pelaporan krisis kesehatan dengan form RHA                                       |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |                             |        |
|        |         | 203  | 1.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi   | a.3 Persentase sistem informasi dikelola sesuai dengan peruntukannya                           |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |                             |        |
|        |         | 02   | 1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | a) Jumlah surat ijin penelitian yang diterbitkan   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |                             |        |
|        |         |      |  | b) Jumlah aplikasi perencanaan dan pelaporan dikelola  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |                             |        |
|        |         | 204  | 1.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                           | a.4 Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi paripurna  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |                             |        |
|        |         |      |  | b.4 Persentase puskesmas terakreditasi utama   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |                             |        |
|        |         | 01   | 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | a) Jumlah rumah sakit yang di monitor mutu pelayanannya di era pandemi covid-19                |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |                             |        |
|        |         | 03   | 2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan  | a) Persentase Puskesmas yang dievaluasi  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |                             |        |
|        |         |      |  | b) Persentase Puskesmas dengan hasil penilaian kinerja cukup                                   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |                             |        |
|        |         |      |  | c) Persentase klinik yang mengajukan ijin operasional dengan kondisi standar                   |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%   |                             |        |

| Tujuan                                       | Sasaran | Kode   | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                         | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |         |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi     |  |    |
|--|---------|--------|--|--|-------------------------------------|---|---------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|------------|--|----|
|  |         |        |  |  |                                     | Tahun 2021  |         | Tahun 2022 |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               |                             |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra |    |
|  |         |        |  |  |                                     | Target  | Rp      | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            |                             |            | 2026                                       | Rp |
|  |         |        |  | d) Persentase rekomendasi ijin operasional rakes diterbitkan                                       |                                     | 0%  |         |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | 0%                          |            |  |    |
|  |         |        |  | e) Persentase pemenuhan P3K pada even tertentu dilayani  |                                     | 0%  |         |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | 0%                          |            |  |    |
|  |         |        |  |  |                                     | 0%  |         |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | 0%                          |            |  |    |
| A. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan |         | 102.03 | 3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   | a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  | 88%                                 | 88%   | 546,640 | 89%        | 1,045,892,997 | 90%        | 13,721,426.15 | 90%        | 14,068,940.63 | 91         | 14,683,166.80 | 91%        | 15,457,714.63 | 91%                         | 15,457,715 |  |    |
|  |         | 2.02   | 1.1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | a.1 Persentase desa dengan perawat ponkesdes aktif   |                                     | 0%  |         |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | 0%                          |            |  |    |
|  |         |        |  | b.1 Persentase puskesmas dengan dokter kontrak aktif   |                                     | 0%  |         |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | 0%                          |            |  |    |
|  |         | 02     | 1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar  | a) Jumlah perawat ponkesdes aktif  |                                     | 0%  |         |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | 0%                          |            |  |    |
|  |         |        |  | b) Jumlah dokter kontrak aktif   |                                     | 0%  |         |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | 0%                          |            |  |    |
|  |         | 2.03   | 1.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | a.2 Persentase ASN bidang kesehatan lulus pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan sesuai rencana |                                     | 0%  |         |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | 0%                          |            |  |    |
|  |         |        |  | b.2 Persentase pejabat fungsional memenuhi angka kredit  |                                     | 0%  |         |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | 0%                          |            |  |    |
|  |         | 01     | 1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | a) Jumlah tenaga yang mengikuti Bimbingan teknis Renbukdes dan SISDMK                              |                                     | 0%  |         |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | 0%                          |            |  |    |
|  |         |        |  | b) Jumlah program dokter intership   |                                     | 0%  |         |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | 0%                          |            |  |    |
|  |         |        |  | c) Jumlah ASN yg mengikuti diklat/workshop/seminar/ lokakarya/ bintek                              |                                     | 0%  |         |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | 0%                          |            |  |    |
|  |         |        |  | d) Jumlah uji kompetensi jabfung perawat dan perawat gigi  |                                     | 0%  |         |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | 0%                          |            |  |    |
|  |         |        |  | e) Persentase pembinaan institusi diknakes   |                                     | 0%  |         |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | 0%                          |            |  |    |

| Tujuan                                       | Sasaran  | Kode   | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                          | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)   | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc  | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi     |   |    |    |    |    |  |
|--|--|--|---|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|---|----|----|----|----|--|
|  |  |  |   |  |  | Tahun 2021  |            | Tahun 2022 |            | Tahun 2023 |            | Tahun 2024 |            | Tahun 2025 |            | Tahun 2026 |            |                             |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode restra |    |    |    |    |  |
|  |  |  |   |  |  | Target  | Rp         | Target     | Rp         | Target     | Rp         | Target     | Rp         | Target     | Rp         | Target     | Rp         |                             |            | 2026                                      | Rp |    |    |    |  |
| A. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan | 1.02.04  | 4.   | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  | 90%  | 90%   | 328,791.00 | 92%        | 355,866.07 | 94%        | 362,110.63 | 94%        | 368,526.92 | 96         | 370,324.94 | 96%        | 376,967.13 | 96%                         | 376,967.13 |   |    |    |    |    |  |
|  |  |  | 2.01  | 1.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   | a.1 Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin usaha             |   | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                             |            | 0%  |    |    |    |    |  |
|  |  |  | 02  | 1) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   | a) Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) diberikan rekomendasi ijin usaha |   | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                             |            |   |    | 0% |    |    |  |
|  |  |  | 2.03  | 1.2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  | a.2 Persentase cakupan SPKP dan SPP-IRT yang diterbitkan   |   | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                             |            |   |    | 0% |    |    |  |
|  |  |  | 01  | 1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | a) Jumlah SPKP yang diterbitkan  |   | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                             |            |   |    |    | 0% |    |  |
|  |  |  |   |  | b) Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan   |   | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                             |            |   |    |    |    | 0% |  |
| 2.05   | 1.3 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | a.3 Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi standar kesehatan |   | 0%   |  |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                             |            | 0%  |    |    |    |    |  |

| Tujuan  | Sasaran | Kode   | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                       | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi    |  |    |
|---|---------|--------|---|--|-------------------------------------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------|-----------|--|----|
|   |         |        |   |  |                                     | Tahun 2021  |           | Tahun 2022 |           | Tahun 2023 |           | Tahun 2024 |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           |                             |           | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra |    |
|   |         |        |   |  |                                     | Target  | Rp        | Target     | Rp        | Target     | Rp        | Target     | Rp        | Target     | Rp        | Target     | Rp        |                             |           | 2025                                       | Rp |
|   |         | 01     | 1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | a) Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemantauan layak sehatnya |                                     | 0%  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 0%        |                             |           |  |    |
|   |         |        |   |  |                                     | 0%  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 0%        |                             |           |  |    |
| A. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat |         | 102.05 | 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | a. Angka Kematian Ibu (AKI)  | 94%                                 | 94%   | 1.805.091 | 95%        | 3.605.078 | 95%        | 3.697.193 | 96%        | 3.802.940 | 96%        | 4.004.776 | 97%        | 4.217.968 | 97%                         | 4.217.968 |  |    |
|   |         |        |   | b. Angka Kematian Bayi (AKB)   |                                     | 0%  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 0%        |                             |           |  |    |
|   |         |        |   | c. Prevalensi balita stunting  |                                     | 0%  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 0%        |                             |           |  |    |
|   |         | 201    | 1.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota              | a.1 Persentase rumah tangga ber-PHBS   |                                     | 0%  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 0%        |                             |           |  |    |
|   |         |        |   | b.1 Persentase Posyandu PURI   |                                     | 0%  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 0%        |                             |           |  |    |
|   |         |        |   | c.1 Persentase sekolah tingkat dasar ber-PHBS  |                                     | 0%  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 0%        |                             |           |  |    |
|   |         |        |   | d.1 Persentase Desa Siaga Aktif  |                                     | 0%  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 0%        |                             |           |  |    |
|   |         |        |   | e.1 Persentase Pondok Pesantren yang Ber-PHBS  |                                     | 0%  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 0%        |                             |           |  |    |
|   |         | 01     | 1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | a) Persentase rumah tangga dikaji  |                                     | 0%  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 0%        |                             |           |  |    |
|   |         |        |   | b) Persentase kader posyandu dibina  |                                     | 0%  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 0%        |                             |           |  |    |
|   |         |        |   | c) Persentase sekolah pendidikan dasar yang diberi penyuluhan kesehatan  |                                     | 0%  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 0%        |                             |           |  |    |
|   |         |        |   | d) Persentase UKBM yang ditulur & dibina tingkat perkembangannya   |                                     | 0%  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 0%        |                             |           |  |    |
|   |         |        |   | e) Persentase kader desa siaga yang dibina   |                                     | 0%  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 0%        |                             |           |  |    |
|   |         |        |   | f) Persentase pondok pesantren yang diberi penyuluhan kesehatan  |                                     | 0%  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 0%        |                             |           |  |    |
|   |         |        |   | g) Jumlah Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten  |                                     | 0%  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 0%        |                             |           |  |    |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)   | Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |   |    | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|---|----|-----------------------------|--------|
|        |         |      |                                    |  |                                     | Tahun 2021  |    | Tahun 2022 |    | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    | Tahun 2025 |    | Tahun 2026 |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode restra |    |                             |        |
|        |         |      |                                    |  |                                     | Target  | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | Target     | Rp | 2026                                      | Rp |                             |        |
|        |         |      |                                    |  |                                     |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |   |    |                             |        |
|        |         |      |                                    | h) Jumlah tema KIE program kesehatan prioritas yang dipromosikan melalui berbagai saluran media  |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%  |    |                             |        |
|        |         |      |                                    | i) Jumlah Kesepakatan Bersama yang dihasilkan dengan LS/Ormas/ Organisasi Profesi/Dunia Usaha dalam rangka peningkatan Promosi Program Kesehatan Prioritas |                                     | 0%  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    | 0%  |    |                             |        |

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selama tahun 2021-2026 adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program tersebut dilaksanakan sebagai komitmen pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Jumlah Ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu setiap 100.000 kelahiran hidup.

- b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Jumlah bayi (umur < 1 tahun ) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu setiap 1.000 kelahiran hidup.

- c. Prevalensi Balita Stunting

Jumlah balita stunting ditemukan dibagi jumlah balita yang diukur tinggi badannya dikalikan 100%.

- d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Total dari nilai persepsi per unsur dibandingkan dengan total unsur terisi dikalikan dengan nilai tertimbang.

- e. Persentase Puskesmas Akreditasi

Jumlah puskesmas yang telah ditetapkan status akreditasinya oleh lembaga atau surveyor dibandingkan dengan jumlah puskesmas yang ada dikalikan 100%.

f. Persentase Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jumlah puskesmas dengan kategori aman untuk 3 indikator KBPKP dibagi jumlah puskesmas dikalikan 100%.

g. CFR COVID-19

Jumlah kematian penderita Covid-19 pada tahun berjalan dibagi Jumlah penderita konfirmasi COVID-19 pada periode tahun yang sama kali 100 persen.

h. CFR HIV/AIDS

Jumlah kematian penderita HIV/AIDS pada tahun berjalan dibagi Jumlah penderita HIV/AIDS pada periode tahun yang sama kali 100 persen.

i. CFR TB paru per 100.000 penduduk

Jumlah kematian penderita TB paru dibagi Jumlah Penduduk kali 100.000 penduduk.

j. Persentase Desa Bebas DBD

Jumlah desa yang dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut tidak ada penderita DBD dibagi Jumlah desa kali 100 persen.

k. Proporsi penderita kusta anak

Jumlah kasus kusta umur 0-14 Tahun yang masih diobati pada tahun berjalan dibagi Jumlah penduduk pada periode tahun yang sama kali 10.000 penduduk.

l. Persentase Desa UCI

Jumlah desa yang seluruh balitanya telah diimunisasi dasar lengkap dibagi dengan Jumlah desa dalam kurun waktu satu tahun kali 100 persen.

m. Prevalensi Hipertensi

Jumlah kasus kusta umur 0-14 Tahun yang masih diobati pada tahun berjalan dibagi Jumlah penduduk pada periode tahun yang sama kali 10.000 penduduk.

n. Prevalensi Diabetes melitus

Jumlah desa yang seluruh balitanya telah diimunisasi dasar lengkap dibagi dengan Jumlah desa dalam kurun waktu satu tahun kali 100 persen.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL T-C.28.

## INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

| No. | INDIKATOR   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020) | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |                |                |                |                |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|---|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|     |   |  | Tahun 1 (2021)              | Tahun 2 (2022) | Tahun 3 (2023) | Tahun 4 (2024) | Tahun 5 (2025) | Tahun 6 (2026) |  |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                         | (5)            | (6)            | (7)            | (8)            | (9)            | (10)                                     |
| 1   | Angka Kematian Ibu (AKI)  | 95.01/100.000 KH                                     | 95.01                       | 95             | 94.08          | 94.06          | 94.04          | 94.04          | 94.04                                    |
| 2   | Angka Kematian Bayi (AKB)   | 11,97/1.000 KH                                       | 11.97                       | 11.95          | 11.93          | 11.91          | 11.89          | 11.89          | 11.89                                    |
| 3   | Prevalensi balita stunting  | 16.86%   | <20%                        | <20%           | <20%           | <20%           | <20%           | <20%           | <20%                                     |
| 4   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 88   | 88                          | 89             | 89             | 90             | 90             | 90             | 90                                       |
| 5   | % puskesmas terakreditasi   | 100%   | 100%                        | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%                                     |
| 6   | % Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | 3.2%   | 3.2%                        | 3.7%           | 4.2%           | 4.7%           | 5.2%           | 5.2%           | 5.2%                                     |
| 7   | CFR Covid-19  | 4.3%   | <10%                        | <8%            | <6%            | <4%            | <2%            | <2%            | <2%                                      |
| 8   | CFR HIV/AIDS  | 31.90%   | 31.90%                      | 30%            | 28%            | 26%            | 24%            | 24%            | 24%                                      |
| 9   | CFR TB paru   | 5,46 per 100.000                                     | 5.46                        | 5.26           | 5.16           | 5.06           | 4.96           | 4.96           | 4.96                                     |
| 10  | Persentase Desa Bebas DBD   | 50%  | 50%                         | 50%            | 52%            | 54%            | 56%            | 56%            | 56%                                      |
| 11  | Proporsi penderita kusta anak   | 0%   | 0%                          | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%                                       |
| 12  | Persentase Desa UCI   | 88.9%  | 88.90%                      | 89%            | 90%            | 90%            | 91%            | 91%            | 91%                                      |
| 13  | Prevalensi Hipertensi   | 40%  | 40.22%                      | 40.17%         | 40.12%         | 40.07%         | 40.02%         | 40.02%         | 40.02%                                   |
| 14  | Prevalensi Diabetes melitus   | 2%   | 2.18%                       | 2.13%          | 2.08%          | 2.03%          | 1.98%          | 1.98%          | 1.98%                                    |

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan pencapaian tujuan bidang kesehatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJMD sebagai wujud program kegiatan yang mendukung visi dan misi Bupati selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam renstra menjadi acuan Dinas Kesehatan dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Ponorogo. Program dan kegiatan di dalam renstra dalam pelaksanaannya dituangkan ke dalam rencana kerja (RENJA) tahunan.

Diharapkan dengan adanya renstra ini semua permasalahan dan isu-isu strategis yang menjadi pekerjaan rumah Dinas Kesehatan dapat terselesaikan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Apabila dikemudian hari diperlukan reviu dalam rangka penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini, maka akan dilakukan reviu sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ponorogo, 25 September 2021

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PONOROGO  
SEKALU PEGUNA ANGGARAN



Dr. Drs. AGUS PRAMONO, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700111 198903 1 002